

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) didirikan pada tahun 2006 dengan nama awal Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP), sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.Kominfo/11/2006.

Pada tanggal 19 November 2010, BTIP bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), sebagai respons terhadap perkembangan pesat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kebutuhan akan layanan TIK yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 2017, BP3TI mengalami perubahan struktur organisasi dan mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Kominfo.

Pada Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi BAKTI. Perubahan nama ini sejalan dengan tugas dan fungsi BP3TI untuk pemeratakan akses telekomunikasi dan informatika di seluruh Indonesia, serta melayani masyarakat.

Akhirnya, pada tahun 2018, perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja BP3TI menjadi BAKTI ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. BAKTI menjadi unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

2.2 Visi Misi

2.2.1 Visi

”Menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik”

Visi BAKTI untuk menjembatani kesenjangan digital di Indonesia mencerminkan komitmennya terhadap keadilan sosial dan peningkatan akses teknologi bagi masyarakat yang terpinggirkan, khususnya di daerah pedesaan dan tertinggal. Dalam konteks ini, kesenjangan digital menjadi isu utama, di mana bukti menunjukkan bahwa infrastruktur digital di daerah pedesaan berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti densitas populasi yang rendah dan jarak yang jauh dari pusat-pusat layanan digital, yang secara langsung mempengaruhi biaya penyediaan infrastruktur tersebut (Sheila & Fahmi, 2024). Oleh karena itu, visi ini bukan sekadar ambisi penggunaan teknologi, tetapi juga merupakan panggilan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BAKTI berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah, guna mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak terjangkau oleh teknologi. Kerja sama ini penting untuk menciptakan pusat-pusat layanan yang dapat diakses dengan mudah di daerah terpencil, meningkatkan partisipasi komunitas dalam penciptaan infrastruktur digital yang berkelanjutan (Ruiz-Martínez & Pérez, 2020). Dengan demikian, visi BAKTI tidak hanya membahas tantangan akses teknologi, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk memberdayakan masyarakat.

BAKTI memandang bahwa setiap individu di Indonesia seharusnya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam revolusi digital tanpa

mengalami kendala akibat lokasi geografis mereka. Hal ini sejalan dengan tren global di mana akses terhadap internet dan teknologi informasi dianggap sebagai elemen krusial untuk pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan (Sriyono et al., 2023). Dengan demikian, visi BAKTI berfungsi sebagai pendorong bagi perbaikan kebijakan publik yang mendukung pengembangan infrastruktur digital secara merata di seluruh Indonesia.

Kesiapan BAKTI untuk menerapkan solusi inovatif, seperti pemanfaatan teknologi telekomunikasi yang lebih efisien dan model bisnis baru dalam penyediaan layanan digital, menunjukkan betapa strategisnya visi ini dalam pweujudan kemajuan Indonesia. BAKTI harus memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat agenda digital inklusif di Indonesia.

Dengan menegaskan visi tersebut, BAKTI tidak hanya memperluas aksesibilitas tetapi juga membentuk kesadaran akan pentingnya kesenjangan digital sebagai isu kritis yang perlu ditangani secara kolektif oleh semua pihak. Melalui visi ini, diharapkan dapat terjalin kesadaran dan dukungan yang luas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara Indonesia, di mana kabel dan jaringan digital menjadi jembatan dalam menghubungkan berbagai komunitas yang terisolasi.

2.2.2 Misi

”Memberikan Layanan Kewajiban Pelayanan Universal yang berkualitas dan tepat sasaran dalam rangka mengatasi kesenjangan digital di Indonesia”

Dalam melaksanakan misinya untuk memberikan layanan Kewajiban Pelayanan Universal yang berkualitas dan tepat sasaran, BAKTI memfokuskan pada tujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial ataupun geografis, dapat menikmati layanan digital yang optimal. Misalnya, di tengah maraknya penggunaan teknologi, BAKTI berkomitmen untuk menyediakan akses ke layanan internet yang berkualitas di daerah-daerah terpencil, yang selama ini seringkali terabaikan

(Purnamawati et al., 2024). Misi ini selaras dengan kebutuhan mendasar masyarakat akan informasi yang akurat dan relevan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Salah satu tantangan terbesar dalam mencapai misi ini adalah memastikan bahwa semua layanan yang diberikan tidak hanya tersedia tetapi juga dapat diakses oleh semua orang. Hal ini mencakup penyediaan pelatihan dan literasi digital kepada anggota masyarakat, guna membantu mereka dalam menjalani kehidupan yang semakin digital. Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan digital yang memadai dapat mendorong inklusi keuangan, terutama dalam konteks pemanfaatan layanan fintech (Pratiwi & Krisnawati, 2021). Oleh karena itu, misi BAKTI untuk meningkatkan kualitas layanan universal menjangkau aspek pendidikan dan pelatihan komprehensif dalam literasi digital.

BAKTI juga berupaya menerapkan pendekatan berbasis data untuk memahami di mana kesenjangan terbesar terjadi. Pendekatan ini memungkinkan BAKTI untuk memprioritaskan sumber daya dan intervensi kepada area yang paling membutuhkan. Dengan menggunakan data yang tepat dan analisis yang mendalam, BAKTI dapat merancang solusi yang lebih efektif dan relevan bagi masyarakat (Firmansah et al., 2024). Strategi berbasis bukti ini penting dalam menciptakan dampak jangka panjang terhadap akses layanan digital universal.

Misi BAKTI tidak hanya berfokus pada aspek penyediaan layanan tetapi juga kualitas layanan yang diberikan. Ini termasuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tahan lama, mudah dioperasikan, dan selalu diperbarui untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari masyarakat modern. Sebuah studi mengindikasikan bahwa masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan digital yang berkualitas dapat mengalami peningkatan signifikan dalam kesejahteraan mereka (Värri, 2023). Oleh karena itu, misi untuk menyediakan layanan yang berkualitas tidak bisa dianggap remeh.

Akhirnya, melalui misi ini, BAKTI menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil. Di zaman di mana kepercayaan publik menjadi semakin penting, BAKTI berupaya untuk membangun hubungan yang kuat dengan komunitas dengan memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan (Dewi et al., 2022). Dengan cara ini, BAKTI berharap untuk menciptakan model layanan publik yang tidak hanya efisien tetapi juga adil, di mana semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 1. 1 Strutur Organisasi BAKTI

Struktur organisasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memegang peranan penting dalam pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) serta pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Keberadaan setiap unit dalam BAKTI tercermin dari tugas dan fungsi masing-masing yang saling berinteraksi, dan ini menunjukkan bahwa sebuah organisasi yang baik harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal

dan internal untuk menemukan solusi serta menciptakan kinerja optimum. Dalam konteks ini, struktur organisasi bukan hanya sekadar hierarki, tetapi juga mencakup dinamika komunikasi yang memudahkan kolaborasi antar unit guna mencapai tujuan bersama (Nizma et al., 2024). Oleh karena itu, pemilihan struktur organisasi yang tepat adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di BAKTI (Nizma et al., 2024).

Pimpinan tertinggi BAKTI adalah seorang Direktur Utama yang diangkat oleh Menteri Kominfo. Pemilihan dan masa jabatan Direktur Utama yang selama lima tahun, dengan kemungkinan perpanjangan, menekankan pentingnya stabilitas dalam kepemimpinan (Jung, 2022). Mengingat tugasnya yang berat dalam merumuskan kebijakan, mengendalikan kinerja organisasi, dan melakukan koordinasi antar unit, kualitas kepemimpinan menjadi sangat krusial dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang ada (Nizma et al., 2024). Selain itu, Kepala Satuan Pemeriksa Intern (SPI) bertugas melakukan audit intern, yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh program dan keuangan BAKTI dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini menambah lapisan pengawasan di dalam organisasi yang penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi.

1. Direktorat Sumber Daya dan Administrasi yang membawahi Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat, Divisi Hukum, serta Divisi Pengadaan dan Sistem Informasi. Direktorat ini fokus pada aspek perencanaan, pengelolaan SDM, serta pendukung administratif dan legal.
2. Direktorat Keuangan yang terdiri atas Divisi Pengelolaan Pendapatan, Divisi Perbendaharaan dan Investasi, Divisi Penyusunan Anggaran dan Akuntansi, serta Divisi Manajemen Risiko. Direktorat ini bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan pengawasan keuangan organisasi.
3. Direktorat Infrastruktur yang menangani pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK, terdiri dari Divisi Satelit, Divisi Infrastruktur Lastmile/Backhaul, serta Divisi Infrastruktur Backbone.

4. Direktorat Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah, yang melayani kebutuhan TIK masyarakat umum dan instansi pemerintahan melalui dua divisi: Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat serta Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Pemerintah.
5. Direktorat Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha yang fokus pada penyediaan layanan TIK untuk sektor swasta, melalui Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha I dan II.

Struktur ini mencerminkan komitmen BAKTI dalam menyediakan layanan telekomunikasi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Di bawah Direktur Utama, terdapat beberapa direktorat yang masing-masing memiliki tugas spesifik. Direktorat Sumber Daya dan Administrasi (SDA) bertanggung jawab atas pengelolaan aspek strategis dan administrasi di BAKTI. Dengan berbagai fungsi yang mencakup perencanaan kinerja hingga pengelolaan sistem informasi, SDA berperan penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang mendukung pencapaian visi organisasi (Chen & Huang, 2007). Selain itu, Direktorat Keuangan, dengan berbagai divisinya, mengelola aspek pendapatan dan memastikan keberlanjutan finansial, yang merupakan lahan penting untuk kelangsungan program-program BAKTI. Melalui kolaborasi yang baik antara berbagai divisi, BAKTI dapat memastikan sumber daya dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Direktorat Infrastruktur memainkan peran sentral dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang diperlukan, mencakup perencanaan, pengembangan fisik, dan pengadaan. Tiga divisi di dalamnya, masing-masing fokus pada area akses, backbone, dan satelit, memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung aksesibilitas telekomunikasi di seluruh Indonesia, khususnya di area yang kurang terlayani. Hal ini juga mencerminkan upaya BAKTI dalam menjangkau daerah terpencil yang merupakan bagian dari komitmen untuk memperluas layanan kepada masyarakat. Setiap struktur dalam direktorat ini saling

melengkapi dan memfasilitasi pelaksanaan tugas BAKTI, sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Direktorat Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat serta Pemerintah mengelola layanan TIK yang diusulkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Melalui dua divisi, direktorat ini memastikan bahwa usulan-usulan tersebut dapat dieksekusi dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang tersedia, serta diawasi dengan ketat. Keberadaan direktorat ini menunjukkan komitmen BAKTI dalam memprioritaskan masukan dari berbagai pihak, yang sangat penting untuk menciptakan program yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, BAKTI tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial melalui teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik.

Dalam mendukung integrasi lintas fungsi, BAKTI juga membentuk Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) yang berisi para pegawai dengan keahlian khusus. Kelompok ini memainkan peranan penting dalam menjalankan tugas teknis yang diperlukan dalam operasional sehari-hari BAKTI. Dengan adanya tenaga ahli dalam berbagai bidang, BAKTI dapat lebih cepat mendapati solusi dari berbagai tantangan yang ada, serta meningkatkan efektivitas operasionalnya. Struktur fungsional ini juga membantu dalam mengembangkan sistem informasi dan memelihara proses bisnis agar lebih efisien, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Kantor wilayah yang didirikan di Surabaya dan Makassar memberikan sentuhan lokal pada pelaksanaan program-program BAKTI. Dengan dipimpin oleh koordinator yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, kedua kantor ini mengoordinasikan implementasi program BAKTI di daerah, sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Disamping itu, keaktifannya dalam menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan literasi digital menunjukkan responsivitas BAKTI terhadap tantangan dan permintaan masyarakat setempat untuk meningkatkan kemampuan digital mereka. Melalui ini, BAKTI memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan tidak hanya terfokus pada target nasional,

tetapi juga memperhatikan tujuan lokal yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dan kemajuan, penting bagi BAKTI untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap struktur organisasinya. Ini termasuk mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa struktur organisasi selalu relevan dan efektif di tengah perubahan yang cepat dalam teknologi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, membangun budaya organisasi yang responsif, inovatif, dan inklusif, menjadi sangat penting demi pencapaian tujuan strategis BAKTI ke depannya (Benner & Tushman, 2003). Struktur organisasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo dirancang secara fungsional dan terpusat untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas serta pemerataan layanan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Di puncak struktur organisasi terdapat Direktur Utama yang memiliki tanggung jawab menyeluruh atas kinerja lembaga, serta dibantu oleh Satuan Pemeriksa Intern yang berfungsi melakukan pengawasan dan audit internal agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan seluruh struktur organisasi BAKTI, terlihat bahwa setiap elemen memiliki peran krusial dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi yang diemban. Dari mulai pimpinan hingga setiap direktorat dan divisi, seluruhnya saling terhubung dan berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun infrastruktur telekomunikasi yang berkualitas di seluruh Indonesia. Struktur yang jelas dan transparan dalam pengelolaan sumber daya dan program, didukung oleh komunikasi yang efektif antar unit, adalah kunci untuk menjaga kinerja BAKTI tetap optimal, sehingga dapat menjawab harapan masyarakat dalam aksesibilitas telekomunikasi yang lebih baik (Qing-min et al., 2012).